

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
UPAYA MENYELAMATKAN ASET NEGARA DI BIDANG PERDATA
PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



FEBRI ARRAHIM
1910112147

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK 1)

Pembimbing :

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H
Dr. Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 05/PK-I/V/2023

**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA
MENYELAMATKAN ASET NEGARA DI BIDANG PERDATA PADA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
(STUDI PERKARA PERDATA NOMOR:13/PDT.G/2021/PN.PDG)**

Febri Arrahim, 1910112147, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 halaman,
Tahun 2023

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah aset negara yang tersebar dan dikuasai oleh berbagai lembaga negara, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, serta instansi negara lainnya, dengan banyaknya aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia tentu tingkat resiko kerugian negara terhadap aset negara sangat besar. Negara harus berupaya untuk menjaga aset negara agar tidak menimbulkan kerugian terhadap negara. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam upaya memulihkan dan menyelamatkan aset negara di bidang perdata melalui peranan Jaksa Pengacara Negara. Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang perdata pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menyelamatkan aset negara? 2. Apa yang menjadi hambatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset negara secara keperdataan? Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode yuridis empiris, yang dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, lalu dibandingkan hukum yang berlaku. Kejaksaan R.I melalui Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dalam upaya menyelamatkan aset negara melalui instrumen perdata memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum yang hakikatnya ialah untuk membela hak-hak keperdataan negara, dan sebagai upaya untuk mengamankan, menyelamatkan, dan memulihkan aset/keuangan negara melalui instrumen perdata. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut belumlah sepenuhnya maksimal, dan terdapat banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan R.I melalui Jaksa Pengacara tersebut. Karena pada pelaksanaannya tidak semua aset negara dapat diselamatkan/dipulihkan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara yang menyebabkan pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam upaya menyelamatkan, mengamankan dan memulihkan aset negara belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci : JPN, Penyelamatan Aset Negara, Pelaksanaan Tugas